



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 15
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja/ ke - 9
Dengan : -
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Kamis, 13 Juli 2017**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. H.M. ALI TAHER, S.H, M.Hum**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Pembahasan RKA K-L dalam RUU APBN Perubahan TA 2017
Hadir : 1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. Menteri Agama RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “**RKA-KL Tahun 2017 Kementerian Agama RI dalam RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami efisiensi belanja barang Kementerian Agama RI dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.389.005.000.000 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima juta rupiah*) sehingga anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2017 menjadi Rp58.777.288.314.000 (*lima puluh delapan triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*), dari anggaran awal sebesar Rp60.166.293.314.000 (*enam puluh triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*).
2. Terkait dengan efisiensi anggaran Kementerian Agama RI dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017, Komisi VIII DPR RI memberikan pendapat dan pandangan untuk ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sebagai berikut:
 - a. Efisiensi harus tidak berdampak pada peningkatan pengelolaan pendidikan keagamaan.
 - b. Memprioritaskan pemenuhan anggaran pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS yang terhutang dan kekurangan honorarium tambahan petugas haji.
 - c. Memprioritaskan pemenuhan anggaran sarana dan prasarana kantor Kementerian Agama RI di tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengoptimalkan pelayanan publik di bidang agama.
 - d. Memprioritaskan pembangunan lanjutan asrama haji di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat melalui tahun jamak.
 - e. Melanjutkan pembangunan revitalisasi asrama haji di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan Kementerian Agama RI dengan rincian sebagai berikut :

- a. Honorarium tambahan petugas haji karena kembali ke kuota normal yaitu 211.000 dan tambahan 10.000 jemaah haji, sebesar Rp54.393.401.000 (*lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus satu ribu rupiah*).
 - b. Pembayaran kekurangan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS sebesar Rp4.630.322.496.000 (*empat triliun enam ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
4. Komisi VIII DPR RI perlu mencermati rencana pengalokasian anggaran untuk persiapan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan oleh karena itu mendesak Kementerian Agama RI untuk memfasilitasi pertemuan tim pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan Komisi VIII DPR RI untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang *road map* pengelolaannya.
 5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk melakukan koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi sejumlah tanah wakaf dan tempat ibadah yang terkena pembangunan jalan Tol.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.